

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WAY KANAN
DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2018**

(Skripsi)

**Oleh
M. Sacca Nezer**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WAY KANAN DALAM PENGELOLAANDAERAH ALIRAN SUNGAI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 1 TAHUN 2018

**Oleh
M. SACCA NEZER**

Kerusakan DAS dari waktu ke waktu terus meningkat, hal ini terjadi akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian, berkurangnya areal hutan, semakin intensifnya pemanfaatan lahan dan kurangnya usaha konservasi tanah dan air, serta belum jelasnya arah pembangunan dalam mengatasi permasalahan sumberdaya air secara nasional. Pengelolaan daerah aliran sungai memiliki aturan hukum dari tingkatan nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai hingga Peraturan daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Way Kanan (2) Apa saja Faktor- faktor yang menjadi penghambat Dinas Kabupten Way Kanan dalam pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Way Kanan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu melakukan kajian terhadap peraturanperundang-undangan dengan menggunakan data sekunder dan teknik penelitian hukum kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan memiliki peran yang sangat besar dalam menangani pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Way Kanan. Rencana Aksi dan Rencana Strategis telah dibentuk secara berkala agar terciptanya daerah aliran sungai yang baik. Pada pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Way Kanan diperlukan koordinasi dari berbagai pihak. (2) Pelaksanaanya mengalami hambatan ketika kurangnya pemahaman dari warga sekitar tentang pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai. kurangnya keterpaduan dan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan daerah aliran sungai serta lemahnya koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan. Sehingga lemahnya koordansi yang dilaksanakan oleh para pelaksana dalam menjalankan pengelolaan daerah aliran sungai menjadi masalah yang harus diselesaikan bersama.

Kata Kunci : Daerah Aliran Sungai, Peraturan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup

ABSTRACT

THE ROLE WAY KANAN REGENCY ENVIRONMENTAL SERVICE IN WATERSHED MANAGEMENT BASED ON REGIONAL REGULATIONS WAY KANAN DISTRICT NUMBER 1 OFF 2018

**By
M. SACCA NEZER**

Watershed damage continues to increase from time to time, this is due to changes in land use patterns from agriculture to non-agriculture, reduced forest areas, more intensive land use and lack of soil and water conservation efforts, as well as unclear development directions in overcoming resource problems. water nationally. Watershed management has legal regulations from the national level, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, RI Government Regulation Number 37 of 2012 concerning Watershed Management to Way Kanan District Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Regional Management River flow. The problems in this thesis are (1) What is the role of the Way Kanan Regency Environmental Service in the Management of Watersheds in Way Kanan Regency (2) What are the factors that hinder the Way Kanan Regency Office in managing watersheds in Way Kanan Regency. The research used is normative-empirical legal research, namely conducting a study of laws and regulations using secondary data and legal research techniques from literature and field studies.

The results of this study indicate that (1) the Environmental Office of Way Kanan Regency has a very large role in handling watershed management in Way Kanan Regency. Action Plans and Strategic Plans have been periodically formed to create good watersheds. The implementation of watershed management in Way Kanan Regency requires coordination from various parties. (2) Its implementation is hampered by a lack of understanding from local residents about the importance of managing watersheds. lack of integration and coordination in planning, implementing and monitoring watershed management as well as weak coordination among various stakeholders. So that the lack of coordination carried out by executors in carrying out watershed management is a problem that must be resolved together.

Keywords: River Basin Area, Regional Regulation, Environmental Agency